



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI
PERTAHANAN (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS
ON DEFENCE INDUSTRY COOPERATION*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
- b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus, pada tanggal 19 Maret 2013 di Jakarta, Indonesia, telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Defence Industry Cooperation*);
- c. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Defence Industry Cooperation*);

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON DEFENCE INDUSTRY COOPERATION*).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Defence Industry Cooperation*) yang telah ditandatangani pada tanggal 19 Maret 2013 di Jakarta, Indonesia.
- (2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Defence Industry Cooperation*) dalam bahasa Indonesia, bahasa Rusia, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Hukum,
Asisten Deputi Bidang Hukum dan
Pengundang-undangan,



Budi Setiawati



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI
PERTAHANAN (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS
ON DEFENCE INDUSTRY COOPERATION*)

I. UMUM

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Defence Industry Cooperation*) yang telah ditandatangani pada tanggal 19 Maret 2013 di Jakarta, Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang.

Materi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Materi muatan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan meliputi tujuan kerja sama, lingkup kerja sama, pengaturan pelaksanaan, otoritas yang ditunjuk, kerahasiaan, penyelesaian perselisihan, dan perubahan. Adapun rincian materi muatan dari Persetujuan dimaksud antara lain:

1. Lingkup kerja sama, meliputi:
 - a. peningkatan kerja sama industri pertahanan antara kedua Negara dalam berbagai bidang yang menjadi kepentingan bersama, termasuk alih teknologi, pengembangan bersama dan produksi bersama, pembekalan, pemeliharaan dan perbaikan;
 - b. peningkatan kerja sama dalam ilmu dan teknologi pertahanan melalui:
 - 1) pertukaran informasi dan personel, pendidikan dan pelatihan, dan saling kunjung;
 - 2) realisasi proyek bersama;
 - 3) penelitian dan pengembangan bersama peralatan pertahanan dan persenjataan baru, peralatan dan persenjataan elektronik, peralatan lain untuk kebutuhan khusus, serta perancangan dan produksi teknologi dari persenjataan dan peralatan yang disebutkan bagi angkatan udara, pertahanan udara dan angkatan darat;
 - c. peningkatan dukungan produk dan jasa serta proyek bilateral yang berkaitan dengan peralatan dan komponen pertahanan;
 - d. proyek bersama dalam bidang rekonstruksi, modernisasi dan konversi fasilitas pembuatan produk yang berorientasi militer; dan
 - e. peningkatan bentuk kerja sama industri pertahanan lainnya yang dapat disepakati oleh Para Pihak.

2. Pembentukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Pembentukan Komite Indonesia – Belarus yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan rencana, program atau kegiatan kerja sama dan merekomendasikan bentuk dan bidang kerja sama yang baru dalam melaksanakan Persetujuan.
3. Penunjukan otoritas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Persetujuan.
4. Pelindungan terhadap setiap informasi yang diperoleh dalam kerangka Persetujuan sesuai hukum nasional masing-masing.
5. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai baik melalui negosiasi maupun saluran diplomatik.
6. Ketentuan mengenai perubahan, saat mulai berlaku, jangka waktu dan pengakhiran Persetujuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6326



REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS
TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus, selanjutnya disebut sebagai Para Pihak;

Mempertimbangkan hubungan yang bersahabat dan kooperatif antara kedua negara;

Berkeinginan untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang sudah terjalin melalui kerja sama industri pertahanan antara kedua negara;

Menyadari bahwa penguatan kerja sama industri pertahanan akan menguntungkan kedua industri pertahanan nasional;

Bertujuan untuk meningkatkan kegiatan kerja sama di bidang industri pertahanan antara kedua negara yang didasarkan pada penghormatan penuh atas kedaulatan dan integritas wilayah dan prinsip-prinsip persamaan, tidak mencampuri urusan dalam negeri, dan saling menguntungkan;

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara;

Telah menyetujui sebagai berikut:

PASAL 1**TUJUAN**

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk membentuk kerangka kerja dalam rangka meningkatkan hubungan industri pertahanan bilateral kedua negara.

PASAL 2**LINGKUP KERJA SAMA**

Lingkup Persetujuan ini dapat meliputi:

1. Peningkatan kerja sama antara industri-industri pertahanan kedua negara dalam berbagai bidang yang menjadi kepentingan bersama, termasuk alih teknologi, pengembangan bersama dan produksi bersama, pembekalan, pemeliharaan dan perbaikan antara lain:
 - a. Persenjataan dan peralatan angkatan udara;
 - b. Persenjataan dan peralatan pertahanan udara;
 - c. Persenjataan dan peralatan angkatan darat;
 - d. Peralatan dan persenjataan elektronik, termasuk sistem senjata kendali dan komando otomatis, komunikasi, transfer data, pengintaian dan sistem peperangan elektronik.
 - e. Perangkat optis, laser dan peralatan untuk kebutuhan khusus.
2. Peningkatan kerja sama dalam ilmu dan teknologi pertahanan melalui:
 - a. Pertukaran informasi dan personel, pendidikan dan pelatihan, dan saling kunjung.
 - b. Realisasi proyek bersama;
 - c. Penelitian dan pengembangan bersama peralatan pertahanan dan persenjataan baru, peralatan dan persenjataan elektronik, peralatan lain untuk kebutuhan khusus, serta perancangan dan produksi teknologi dari

persenjataan dan peralatan yang disebutkan bagi angkatan udara, pertahanan udara dan angkatan darat.

3. Peningkatan dukungan produk dan jasa serta proyek-proyek bilateral yang berkaitan dengan peralatan dan komponen pertahanan.
4. Proyek bersama dalam bidang rekonstruksi, modernisasi dan konversi fasilitas pembuatan produk-produk yang berorientasi militer.
5. Peningkatan bentuk-bentuk kerja sama industri pertahanan lainnya yang dapat disepakati oleh Para Pihak.

PASAL 3

PENGATURAN PELAKSANAAN

1. Badan-badan yang berwenang dari Para Pihak dapat membentuk pengaturan pelaksanaan tertentu, berkaitan dengan aspek-aspek spesifik dan teknis kerja sama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dalam kerangka Persetujuan ini.
2. Para Pihak bersama-sama menentukan bahwa setiap permasalahan hak kekayaan intelektual yang timbul dalam pelaksanaan Persetujuan ini akan diatur dalam pengaturan yang terpisah.
3. Untuk melaksanakan Persetujuan ini Para Pihak akan membentuk Komite Indonesia - Belarus yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan rencana, program atau kegiatan-kegiatan kerja sama dan merekomendasikan bentuk-bentuk dan bidang-bidang kerja sama yang baru.

PASAL 4

OTORITAS YANG DITUNJUK

Para Pihak menunjuk otoritas berikut ini yang bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini:

- Untuk Pemerintah Republik Indonesia – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
- Untuk Pemerintah Republik Belarus – Komite Industri Militer Negara Republik Belarus, Kementerian Pertahanan Republik Belarus.

PASAL 5

KERAHASIAAN

1. Para Pihak wajib memberikan pengamanan untuk setiap informasi yang diperoleh dalam kerangka Persetujuan ini sesuai dengan hukum nasional masing-masing. Penyingkapan atau pelepasan informasi oleh salah satu Pihak kepada pihak ketiga, dan pengalihan secara langsung maupun tidak langsung, hanya diperbolehkan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak yang menyediakan informasi.
2. Tidak satupun dari Para Pihak diijinkan untuk mengalihkan atau menjual peralatan, persenjataan, produk militer termasuk teknologi terkait dan informasi yang diperoleh dari dalam kerangka Persetujuan ini, kepada orang, badan hukum atau badan negara dari pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis antara Para Pihak.
3. Informasi yang diterima dari salah satu Pihak dalam pelaksanaan kerja sama tidak boleh digunakan untuk merugikan kepentingan Pihak lainnya.

4. Badan-badan yang berwenang dari Para pihak menyadari rahasia komersial yang berkaitan dengan bidang kerja sama dan akan merumuskan pengaturan yang diperlukan untuk melindungi dan mempergunakan rahasia tersebut untuk keuntungan bersama.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul dari atau berkaitan dengan pelaksanaan atau penerapan dari Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai baik melalui negosiasi maupun saluran diplomatik.

PASAL 7

PERUBAHAN

Persetujuan ini dapat diubah setiap saat atas persetujuan bersama secara tertulis antara Para Pihak. Perubahan tersebut mulai berlaku pada tanggal yang disepakati oleh Para Pihak.

PASAL 8

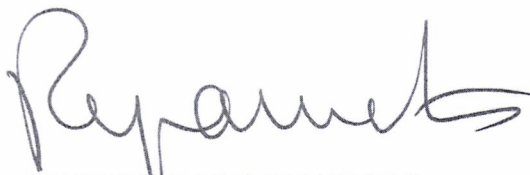
SAAT MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal penerimaan nota diplomatik terakhir di mana Para Pihak saling memberitahukan mengenai selesainya pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan masing-masing bagi berlakunya Persetujuan ini. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis akan diperpanjang untuk periode 5 (lima) tahunan berikutnya, kecuali salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum kehendak untuk mengakhiri Persetujuan ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Para Pihak, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Jakarta, pada hari ke-19 Maret 2013, dalam dua rangkap asli dalam bahasa Indonesia, Rusia dan Inggris, semua naskah berkekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, naskah dalam bahasa Inggris yang akan berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**



PURNOMO YUSGIANTORO

Menteri Pertahanan

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK BELARUS**



SERGEI P. GURULEV

Ketua Komite Industri Militer Negara



REPUBLIK INDONESIA

**СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ОБОРОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

Правительство Республики Индонезия и Правительство Республики Беларусь, именуемые в дальнейшем Сторонами,

признавая существующие дружественные и партнерские отношения между двумя государствами,

желая развивать и укреплять существующие двусторонние связи путем сотрудничества обоих государств в сфере оборонной промышленности,

признавая, что укрепление сотрудничества в сфере оборонной промышленности будет обоюдно выгодным для развития оборонных промышленностей обоих государств,

стремясь развивать сотрудничество в сфере оборонной промышленности между государствами Сторон на основе полного уважения суверенитета, территориальной целостности, принципов равенства, невмешательства во внутренние дела, а также взаимной выгоды,

в соответствии с национальными законодательствами своих государств

договорились о нижеследующем:

Статья 1 **Цель**

Целью настоящего Соглашения является создание основы для развития двусторонних отношений между оборонными промышленностями обоих государств.

Статья 2 **Направления сотрудничества**

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется по следующим направлениям:

1. Развитие сотрудничества между оборонными промышленностями двух государств в различных областях, представляющих взаимный интерес, в том числе передача технологий, совместные разработки и производство, поставка, обслуживание и ремонт:
 - а) авиационной техники и вооружения;
 - б) техники и вооружения для противовоздушной обороны;
 - в) техники и вооружения для сухопутных войск;
 - г) электронной техники и вооружения, включая автоматизированные системы управления войсками и оружием, системы и комплексы средств связи, передачи данных, разведки и радиоэлектронной борьбы;
 - д) оптических устройств, лазерной аппаратуры и приборов специального назначения.

2. Развитие сотрудничества в сфере оборонных технологий и науки путем:
- а) обмена информацией и специалистами, обучения и подготовки, осуществления визитов;
 - б) реализации совместных проектов;
 - в) проведения совместных исследований и разработок новых образцов вооружения и военной техники, электронной техники и вооружения, другого оборудования, а также реализации технологий разработки и производства указанных техники и вооружения для авиации, противовоздушной обороны и сухопутных войск.
3. Осуществление поддержки производства и обслуживания, а также совместных проектов в сфере военной техники и комплектующих для ее производства.
4. Реализация совместных проектов по реконструкции, модернизации и конверсии предприятий, производящих продукцию военного назначения.
5. Сотрудничество в сфере оборонной промышленности может осуществляться и по другим согласованным Сторонами направлениям.

Статья 3 **Исполнение договоренностей**

1. Уполномоченные органы Сторон заключают соглашения по специфическим и техническим направлениям сотрудничества, указанным в статье 2 настоящего Соглашения.
2. Стороны определяют, что любые вопросы прав интеллектуальной собственности, вытекающие при реализации настоящего

Соглашения, будут регулироваться путем заключения отдельных соглашений.

3. Для реализации настоящего Соглашения Стороны создают Индонезийско-Белорусский комитет, ответственный за подготовку планов, программ или мероприятий по сотрудничеству, а также за разработку рекомендаций по новым формам и областям сотрудничества.

Статья 4 **Уполномоченные органы**

Договаривающиеся Стороны определяют ответственными за реализацию положений настоящего Соглашения следующие уполномоченные органы:

- от Правительства Республики Индонезия – Министерство обороны Республики Индонезия;
- от Правительства Республики Беларусь – Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь, Министерство обороны Республики Беларусь.

Статья 5 **Конфиденциальность**

1. Стороны обеспечивают сохранность информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, в соответствии с национальными законодательствами. Распространение, публикация информации и ее передача напрямую или косвенно любой из Сторон третьей стороне допускаются только с письменного согласия Стороны, предоставившей эту информацию.
2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать или продавать физическим или юридическим лицам и государственным органам

третьей стороны военную технику, вооружение, продукцию, в том числе технологии и информацию, полученные в рамках настоящего Соглашения, без письменной договоренности между Сторонами.

3. Информация, полученная от одной из Сторон в процессе сотрудничества, не может использоваться во вред интересам другой Стороны.
4. Уполномоченные органы Сторон соблюдают коммерческую тайну, относящуюся к сфере сотрудничества, и заключают необходимые соглашения по ее защите и взаимовыгодному использованию.

Статья 6 **Урегулирование споров**

Все спорные вопросы, связанные с реализацией или применением настоящего Соглашения, будут решаться путем переговоров или по дипломатическим каналам.

Статья 7 **Изменения**

Настоящее Соглашение может быть изменено в любое время на основе обоюдного письменного согласия Сторон. Такие изменения вступают в силу с даты, согласованной Сторонами.

Статья 8 **Вступление в силу, срок действия и прекращение действия**

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последней из дипломатических нот, посредством которых Стороны обмениваются информацией о завершении выполнения требований национальных законодательств для вступления настоящего Соглашения в силу. Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние

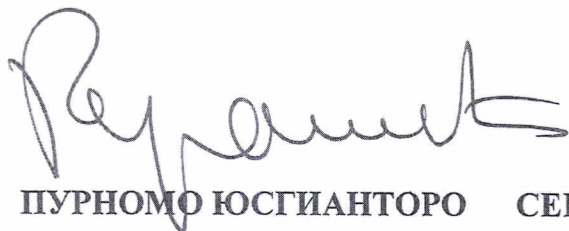
периоды, пока одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о намерении прекратить действие настоящего Соглашения не позже чем за шесть месяцев до желаемой даты его прекращения.

В подтверждение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные Сторонами, подписали настоящее Соглашение.

Совершено в г. Джакарте 19 марта 2013 года в двух экземплярах на индонезийском, русском и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае возникновения разногласий в толковании положений настоящего Соглашения предпочтение отдается тексту на английском языке.

**ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ**

**ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**



ПУРНОМО ЮСГИАНТОРО

Министр обороны



СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ГУРУЛЕВ

Председатель Государственного

военно-промышленного

комитета



REPUBLIK INDONESIA

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS
ON DEFENCE INDUSTRY COOPERATION**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus, hereinafter referred to as Parties;

Considering the friendly and cooperative relations existing between the two countries;

Desiring to enhance and strengthen the existing bilateral relationship through defence industry cooperation between the two countries;

Recognizing that the strengthening of defence industry cooperation will be beneficial to both national defence industry;

Aiming to promote cooperative activities in the field of defence industry between the two countries based on full respect of sovereignty and territorial integrity and the principles of equality, non interference to the internal affairs, and mutual benefit;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of the two countries;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1**PURPOSE**

The purpose of the Agreement is to provide a framework in order to promote bilateral relations of the defence industries of both countries.

ARTICLE 2**SCOPE OF COOPERATION**

The scope of this Agreement may include:

1. Promotion of cooperation between the defence industries of the two countries in various areas of mutual interest, including transfer of technology, joint development and joint production, supply, maintenance and repair among others of:
 - a. Air force armaments and equipment;
 - b. Air defence armaments and equipment;
 - c. Army armaments and equipment;
 - d. Electronic equipment and armaments, including automated command and control weapons systems, communications, data transfer, reconnaissance and electronic warfare systems;
 - e. Optical devices, lasers and special purpose equipment.
2. Promotion of cooperation in defence science and technology through:
 - a. Exchange of information and personnel, education & training, mutual visits;
 - b. Realization of joint projects;
 - c. Joint research and development of new defence equipment and armaments, electronic equipment and armaments, other special

purpose equipment, as well as design and production technologies of the above armaments and equipment for the air force, air defence and army.

3. Promotion of areas of product support and services as well as bilateral projects relating to defence equipment and components.
4. Joint project on reconstruction, modernization and conversion of facilities manufacturing military-oriented products.
5. Promotion of any other areas of defence industry cooperation as may be agreed by the Parties.

ARTICLE 3

IMPLEMENTING ARRANGEMENTS

1. The authorized bodies of the Parties may conclude particular implementing arrangements, pertaining to specific and technical aspects of aforementioned in Article 2 cooperation within the framework of this Agreement.
2. The Parties mutually determine that any intellectual property issues arising under the implementation of this Agreement will be regulated under separate arrangements.
3. To implement this Agreement the Parties will establish an Indonesia-Belarus Committee responsible for preparing plans, programs or activities of cooperation and recommending its new forms and areas.

ARTICLE 4

DESIGNATED AUTHORITIES

The Parties designate the following authorities responsible for the implementation of provisions of this Agreement:

- For the Government of the Republic of Indonesia - Ministry of Defence of the Republic of Indonesia;
- For the Government of the Republic of Belarus – State Military Industrial Committee of the Republic of Belarus, Ministry of Defence of the Republic of Belarus.

ARTICLE 5

CONFIDENTIALITY

1. The Parties shall provide security for any information received within the framework of the Agreement in accordance with their respective national laws. Disclosure or release of information by one of the Parties to any third party, and transfer directly or indirectly, is allowed only at the prior written consent of the Party providing the information.
2. Neither of the Parties is authorized to transfer or sell military equipment, armaments, products including related technologies and information received within the framework of this Agreement, to persons, legal entities or state bodies of the third party without written consent between the Parties.
3. Information received from one of the Parties in the course of cooperation may not be used to harm interests of the other Party.

4. The authorized bodies of the Parties observe the commercial secrets related to the sphere of cooperation and will formulate necessary arrangements to protect and use such secrets for mutual benefits.

ARTICLE 6

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute arising from or in connection with the implementation or application of this Agreement shall be settled amicably through either negotiation or diplomatic channels.

ARTICLE 7

AMENDMENT

This Agreement may be amended at any time by mutual written agreement between the Parties. Such amendment shall come into force on the date agreed by the Parties.

ARTICLE 8

ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the latest diplomatic notes through which the Parties have informed each other on completion of fulfilment of the requirements set up by their domestic legislation for the entry into force of this Agreement. This Agreement is valid for 5 (five) years and shall be automatically extended for the next 5 (five) year periods unless one of the Parties notifies in writing about its intention to terminate the Agreement not later than 6 (six) months prior to its intention to terminate this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized by the Parties, have signed the present Agreement.

Done in Jakarta, on the 19th day of March 2013, in two original copies in Indonesian, Russian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in the interpretation of the provisions of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA



PURNOMO YUSGIANTORO

Minister for Defence

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF BELARUS

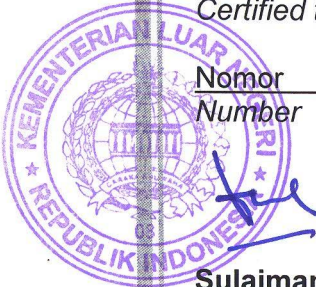


SERGEI P. GURULEV

Chairman of the State Military
Industrial Committee

Salinan naskah resmi
Certified true copy

Nomor : 0252/CTC/10/2018/52
Number



Sulaiman

NIP. 19651025 199103 1 017

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia
Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal : 10 Oktober 2018
Date

